

# DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DIY

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
<b>001 UMUM</b>					
1	Surat Rahasia	1. UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; 2. Pasal 17 UU No. 14 Th 2008 Huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak terbatas
2	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	1. UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; 2. Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf i dan j	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/ dilaksanakan
3	Disposisi surat pimpinan	1. UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan; 2. Pasal 17 UU No 14 Th 2008 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyesuaian kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
4	Informasi data pribadi penegak perda (PPNS)	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
<b>500 PEREKONOMIAN</b>					
5	Lokasi server	1. UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 2. UU No 14 Th 2008 Pasal 17 huruf b, i, dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
6	Internet protocol/IP address private	1. UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku

		2. UU No 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j			
7	Dokumen pengadaan barang/ jasa pemerintah	1. Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai/diketahui pemenangnya
8	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	1. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j 2. Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
9	Dokumen penawaran kontrak	1. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j 2. Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai
<b>700 PENGAWASAN</b>					
11	Naskah hasil pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP)	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin dari pihak yang diperiksa
12	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No 14 Th 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
<b>800 KEPEGAWAIAN</b>					
13	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Huruf h	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan

14	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	1. PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, pasal 14	Menggangu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
		2. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j			
15	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	1. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i, dan j	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan izin	Sampai keluarnya keputusan izin
		2. PP No 10 tahun 1983 jo. PP No 45 tahun 1990			
16	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	1. UU No 11 Th 2008 tentang ITE	Data yang bersifat pribadi bila di buka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan	Selama masih bersangkutan jadi PNS
		2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i & j			
17	Arsip data perseorangan PNS	UU no 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, & j	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan privasi seseorang	Selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS atau diijinkan yang bersangkutan
<b>900 KEUANGAN</b>					
18	Dokumen laporan/surat bertanggungjawab keuangan/SPJ berikut lampirannya	1. UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2)	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa/pengawasan/ auditor
		2. UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i, dan j			
19	Kode akses sistem elektronik	UU No.11/2008 Tentang ITE Pasal 1 angka 6	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan